

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja di Depnakertrans, belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip sesuai ciri-ciri penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan: a) belum semua kegiatan dan subkegiatan tupoksi memiliki indikator kinerja dan belum sepenuhnya mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal sebagai acuan dasar dalam meningkatkan kinerja organisasi; b) belum semua kegiatan tupoksi Depnakertrans memiliki Standar Biaya Khusus, bahkan kuantitas dan kualitas SBK Depnakertrans yang ada masih sangat terbatas; c) belum semua program dan kegiatan dilakukan evaluasi kinerja, akibatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang selama ini berjalan, kurang memiliki implikasi terhadap perbaikan kinerja program, bahkan cenderung terjadi pemborosan pada belanja perjalanan dinas.
2. Kapasitas aparatur yang berperan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, terutama dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja, masih sangat terbatas dan perlu peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya perlu diterapkan mekanisme *reward and punishment* secara seimbang, dan penetapan remunerasi pegawai dengan pendekatan *merits system*. Sosialisasi terhadap peraturan dan pedoman dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu terus dilakukan dengan sistematis dan melibatkan pegawai baik di level, staf, middle management, maupun top management.
3. Penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam kerangka pembaharuan manajemen keuangan negara, memerlukan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang terus-menerus, serta adanya kepastian dan kejelasan fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing instansi pemerintah.

4. Keberhasilan penerapan penganggaran berbasis kinerja sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kemauan aparatur untuk melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

5.2. Saran

1. Perlu bidang/bagian dalam unit organisasi yang bertanggungjawab terhadap tupoksi penyusunan standar biaya, penentuan indikator kinerja, dan evaluasi kinerja, dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas belanja Depnakertrans;
2. Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun petunjuk teknis yang mudah dipahami oleh semua kementerian/lembaga, menyangkut penyusunan indikator kinerja, penyusunan standar biaya, dan evaluasi kinerja;
3. Perlu adanya restrukturisasi program dan kegiatan yang mengacu kepada tugas masing-masing kementerian lembaga, yang diikuti pula oleh perubahan stuktur organisasi yang tidak sesuai dengan penerapan prinsip *money follow function and function follow structure*.
4. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, khususnya di bagian-bagian yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Sumber daya manusia yang disertai tugas bidang ini harus memiliki kemampuan analisis dalam melakukan pengkajian terhadap aspek perencanaan dan penganggaran.